

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka kemiskinan di pedesaan sebesar 12,52%, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 9,70%. Kemiskinan di pedesaan dikaitkan dengan sejumlah masalah, termasuk terbatasnya akses terhadap pekerjaan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.¹ Jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, kualitas hidup masyarakat di pedesaan masih cukup jauh tertinggal. Indikator-indikator seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan rendahnya tingkat literasi di daerah pedesaan menunjukkan ketertinggalan kualitas hidup masyarakat desa. Kondisi ini berakibat pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk memerangi kemiskinan adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dalam strategi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan berupa keuangan bersyarat (*conditional cash transfer*) dan keuangan tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) kepada masyarakat miskin. Program BLT awalnya dilaksanakan di negara Brazil, dan negara-negara lain juga bermaksud menerapkan strategi ini di negara mereka. Tingkat pendanaan dan prinsip operasional serta mekanisme program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bervariasi tergantung

¹ Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023*, (Indonesia: BPS RI 2023), h.11, diunduh pada 5 Oktober 2023, pukul 16.52 WIB.

pada kebijakan pemerintah pusat. Program BLT juga dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005, dengan sasaran masyarakat yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Bantuan yang diberikan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berupa uang tunai, pangan, asuransi kesehatan serta beasiswa pendidikan. BLT pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM).²

Tujuan utama program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang terdapat dalam tiga kategori diatas yaitu masyarakat hampir miskin, miskin dan sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun masih banyak perdebatan yang muncul baik dari pihak penerima maupun nonpenerima program BLT ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya oleh sejumlah organisasi.³

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial , salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan untuk menekan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kasus COVID-19 sendiri pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Wabah ini telah

² Nafiah, Ilma, Risma Wira Bharata “Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di desa Podosoko” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Vol. 6, No. 3 (September-Oktober 2021) Universitas Islam Lamongan, h. 264-265, diakses pada 18 Mei 2023, pukul 19.15 WIB.

³ Baso Iping “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19 Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, Vol. 1, No. 2, (Padang:Universitas Ekasakti, 2020), h. 518, diakses pada 18 Mei 2023, pukul 20.03 WIB.

ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat sangat pesat hingga pada bulan Juni 2020, tercatat 31.186 kasus COVID-19 dan 1851 kasus meninggal dunia akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan Indonesia. Secara global, pandemi COVID-19 telah menunjukkan dampaknya pada perekonomian, termasuk di Indonesia.⁴

Dampak dari Covid-19 sangat berpengaruh dalam dunia usaha di seluruh dunia serta dampak tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan angka kemiskinan di 22 provinsi di Indonesia pada Maret 2020. Kenyataannya, angka kemiskinan meningkat lebih dari 0,8% di seluruh provinsi di Pulau Jawa pada Maret 2020.⁵ Peningkatan angka kemiskinan tersebut disebabkan karena wabah COVID-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemudian dari data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tercatat peningkatan kemiskinan di seluruh kota Provinsi Banten dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 5,92 persen dari tahun sebelumnya yaitu hanya sekitar 5,09 persen penduduk miskin di Provinsi Banten. Kemudian persentase penduduk miskin pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan mencapai 6,66 persen.⁶ Namun pada tahun berikutnya, penduduk miskin di Provinsi Banten terus menurun hingga pada bulan september 2022 sebesar 6,24 persen kemudian terjadi lagi penurunan penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 6,17 persen,

⁴ Ririn Noviyanti Putri “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, Vol. 20, No. 2 (Jambi:Universitas Kader Bangsa, 2020), h.706, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 18.14 WIB.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kenaikan Angka Kemiskinan Maret Tahun 2020 kenaikan diatas 0,8 persen*, (Banten : BPS RI 2020), diunduh pada 24 Mei 2023, pukul 08.35 WIB.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Banten*, (Provinsi Banten: BPS RI 2017-2021), h. 3, diunduh pada 25 Mei 2023, pukul 22.03 WIB.

menurun 0,49 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 829,66 orang. Terjadi penurunan mencapai 3,53 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten.⁷ Penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tersebut menunjukkan bahwa salah satu program pemerintah yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan dengan efektif untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

BLT merupakan program santunan jangka pendek yang ditawarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu mereka yang dianggap miskin dan terkena dampak covid-19 yang sangat beresiko pada waktu itu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu komponen perlindungan sosial dan juga merupakan salah satu jenis kebijakan pemerintah Indonesia. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah sekumpulan tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan peluang (*opportunities*) dimana kebijakan yang diusulkan tersebut berguna dalam mengatasi mencapai tujuan yang diinginkan.⁸

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu jenis kebijakan pemerintah Indonesia yang mana Pemerintah menerapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di dalamnya. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program

⁷ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Banten Maret 2023*, (Provinsi Banten:BPS RI 2023), h. 4, diunduh pada 5 Oktober 2023, pukul 14.04 WIB.

⁸ Irfan Sofi "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Pemulihan Ekonomi Desa" *Indonesia Treasury Review:Jurnal Perbendaharaan, Keuangan dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No.3, 2021, h. 249, diakses pada 20 mei 2023, pukul 11.13 WIB.

Sembako, Bantuan Sosial Tunai (Bansos), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik hanyalah sebagian kecil dari program-program yang menjadi dasar kebijakan PEN.⁹ Kemudian, melalui anjloknya aktivitas ekonomi dari berbagai lapangan usaha, angka kontraksi ekonomi Indonesia dapat dicermati secara lebih mendalam.¹⁰

Kebijakan PEN menguntungkan masyarakat secara ekonomi, namun rentan penyalahgunaan dalam penerapannya. Penyerahan bantuan kepada masyarakat ditemukan memiliki delapan jenis masalah, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Penyalahgunaan seperti Pungutan Liar (Pungli) sebanyak 46 kejadian (19,25%), kesalahan pencantuman sebanyak 43 kasus (17,99%), dan bantuan tidak diterima warga sebanyak 23 kasus (9,62%) merupakan tiga besar dari delapan jenis penyalahgunaan bantuan menurut ICW. Kemudian lima jenis masalah lainnya adalah terkait jenis bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi yang mencapai 20%, Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencapai 18,89%, Bansos Kemensos mencapai 17,22%, bansos dari kabupaten/kota pemerintah mencapai 12,7%, kartu sembako dan bantuan presiden mencapai 10%, dan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 2,78% adalah contoh penyalahgunaan yang paling sering dilaporkan.¹¹ Mulai tahun 2023, program BLT Kemiskinan Ekstrim akan berperan sebagai program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Abdul Halim Iskandar,

⁹ “Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai solusi dari dampak COVID-19, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 09.26 WIB.

¹⁰ Nafida Arumdani, dkk “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol.2, No. 5, (Jawa Timur:Universitas Veteran, 2021), h. 877, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 14.25 WIB.

¹¹ “Korupsi Dana PEN : Perlu Pengawasan Ketat” <https://antikorupsi.org/id/korupsi-dana-pen-perlu-pengawasan-ketat>, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 14.15 WIB.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), BLT dihentikan sejak wabah Covid-19. Akibatnya, dasar pemikiran pengalokasian BLT harus diubah untuk mencerminkan prioritas pembangunan negara pada tahun 2023. BLT untuk Kemiskinan Ekstrim bernilai Rp 300.000 per rumah tangga per bulan, yang nilainya tetap sama dengan BLT Dana Desa.¹²

Dana Desa akan terus digunakan untuk mendanai program BLT Kemiskinan Ekstrim. Jumlah Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk program BLT Kemiskinan Ekstrim tidak terbatas. Jika ada penerima manfaat yang sesuai dengan persyaratan, masyarakat dapat membelanjakan lebih dari 40% dana masyarakatnya untuk BLT. Jika tidak ada warga yang sangat miskin di suatu desa, kemungkinan juga tidak ada BLT yang disalurkan di sana.¹³ Keluarga yang sangat miskin atau keluarga yang berpenghasilan kurang dari Rp. 11.633 per hari merupakan keluarga penerima manfaat dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penduduk desa yang berpenghasilan kurang dari 80% garis kemiskinan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap sangat miskin. Kemiskinan ekstrim dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pertama, hampir semua kompleksitas multifaset kemiskinan ada pada orang yang sangat miskin.¹⁴ Secara khusus, orang yang sangat miskin dan juga

¹² Ika Agustina, Asep Hendra “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” *Jurnal Ekonomi dan Publik (JEKP)* Vol. 8, No. 2, (Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021), h. 134-135, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 10.14 WIB.

¹³ Suryaningsih Aseh, Tengku Fahrul Gafar, Zamhasari Zamhari “Poblematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” *Journal Of Election and Leadership (JOELS)* Vol. 3, No. 2, LPPM, Universitas Lancang Kuning, 2020, h. 30-31, diakses pada 25 Mei 2023, pukul 21.11 WIB.

¹⁴ Rehadian Teja Sukmana Putra, Suryo Adi Wibowo, Yosep Agus Pranoto “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan BLT di Kecamatan Sampang Menggunakan

lanjut usia, sendirian, tidak dapat bekerja, lumpuh, menderita penyakit kronis, tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan tidak memiliki akses ke air bersih dan layanan sanitasi. Kedua, orang miskin yang sangat produktif (berusia 15–64), yang tidak memiliki penyakit kronis dan tidak termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas, tetap dapat mengejar aktualisasi diri agar tetap eksis. Dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT), hampir setiap desa di seluruh Indonesia mengalami permasalahan yang sama, yaitu ketimpangan program bantuan.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yunita dkk dengan judul “Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu” menjelaskan bahwa ketimpangan BLT terjadi karena disebabkan oleh ketidakteraturan data penerima bantuan langsung tunai dan kurangnya keterbukaan informasi terkait BLT di beberapa desa, yang kemudian menyebabkan ketimpangan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.¹⁵

Pemerintah Kabupaten Serang berupaya berkordinasi dengan kantor desa terkait pendataan penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal ini dilakukan agar menghasilkan data penerima manfaat yang akurat sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bermanfaat dan membantu mengurangi beban masyarakat dari dampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Serang tengah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar 5,7 milyar untuk 9.300 Keluarga Penerima

Metode SAW dan Metode AHP Berbasis Web” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)* Vol. 5, No.1,(Malang:Fakultas Teknologi Industri,2021), h.322, diakses pada 25 Mei 2023, pukul 23.00 WIB.

¹⁵ Yunita, Irma, Andi Agustang “Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap” *Pinisi Review : Journal Of Sociology Education* Vol. 1, No. 2, (Makasar:Universitas Makasar,2021), h.182, diakses pada 26 Mei 2023, pukul 01.11 WIB.

Manfaat (KPM) se-Kabupaten Serang. Untuk besaran BLT yang diberikan adalah sebesar Rp. 100.000 perbulan selama 3 bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp. 300.000 per-KPM untuk periode September-November 2023.¹⁶

Desa Sindanglaya merupakan salah satu desa di Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 4.878 jiwa dengan total 326 KK (Kartu Keluarga) dan terdapat 5 Rukun Warga serta 12 Rukun Tetangga dari 12 Kampung di desa tersebut. Dengan jumlah penduduk miskin atau penduduk yang menerima program BLT sebanyak 54 orang setara dengan 1,1% dari jumlah penduduk yang ada.¹⁷ Desa Sindanglaya merupakan salah satu desa di Kabupaten Serang yang menerima dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Selama proses pendistribusiannya mungkin mengalami kendala dan juga permasalahan baik dari data yang perlu di verifikasi serta pemanfaatan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Praktik BLT melalui pasar desa yang masih kosong ini diangkat sebagai studi kasus penelitian di sejumlah studi literatur. Beberapa literatur yang pernah diliput Desa Sindanglaya antara lain sisi kepemimpinan transformasional, penerapan tata kelola yang baik dalam Sistem Informasi Desa, dan tata kelola kolaboratif dalam praktik kemandirian desa. Pilihan penetapan kriteria pengguna BLT yang selama ini terjadi biasanya tidak mempertimbangkan kriteria keluarga miskin sehingga menimbulkan persoalan tambahan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, jumlah kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak harus

¹⁶ “Pembkab Serang Siapkan BLT Rp5,7 M Untuk 9.300 Warga Terdampak Kenaikan BBM”, <https://serang.suara.com/read/2022/09/09/061500/pembkab-serang-siapkan-blt-rp57-m-untuk-9300-warga-terdampak-kenaikan-bbm>, diakses pada 27 Maret 2024 pukul 17.18 WIB.

¹⁷ Suhaemi “Data dan Informasi Penduduk Desa Sindanglaya” (Buku Laporan Tahunan, Kantor Desa Sindanglaya, Serang, 2023), h. 15.

dikurangi, yang membutuhkan sistem pendukung keputusan yang efektif. Agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diberikan kepada keluarga yang paling membutuhkan. Diperlukan suatu mekanisme dalam perkembangan teknologi informasi saat ini untuk memastikan apakah bantuan langsung tunai diterima di lokasi yang relevan. Kemampuan sistem pendukung keputusan untuk secara cepat dan akurat menentukan dan memilih mereka yang berhak menerima bantuan keuangan langsung sangat diharapkan.¹⁸

Untuk melihat indikator tercapainya program BLT dalam membantu masyarakat miskin di Desa Sindanglaya dapat diukur melalui implementasi dan dampak pelaksanaan program tersebut. Sehingga dapat diidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Sindanglaya khususnya masyarakat miskin penerima manfaat dan apakah pengaruh program BLT tersebut dapat membantu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Sindanglaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara menyeluruh terkait pengaruh dari program BLT terhadap kualitas hidup masyarakat di Desa Sindanglaya. Oleh karena itu, dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten”**.

¹⁸ Ashilly Achidsti, Muhammad Zidny Kafa, Ahmad Mizdad Hudani “Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi” *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 6, No. 2, (Yogyakarta:Universitas Nahdlatul Ulama,2020), h. 315, diakses pada 26 Mei 2023, pukul 02.20 WIB.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai upaya untuk memperluas pemahaman terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan sebuah inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, menambah wawasan penulis, khususnya di bidang ekonomi masyarakat pedesaan dan dapat dijadikan pedoman bagi penulis untuk mengimplementasikan temuan penelitian ini secara praktis.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penulisan ini peneliti mengharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal memperluas wawasan serta pengetahuan terkait program pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan hasil kajian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sindanglaya sebagai sumber informasi.

c. Bagi Pemerintah Desa

Dengan penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan kontribusi dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan secara terperinci. Maka secara garis besar sistematika penulisan dari bab pertama hingga akhir terkait dengan judul penelitian Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Banten adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini membahas tentang pendahuluan, yang meliputi konteks latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan juga membahas tentang sistematika dari penulisan penelitian ini.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tentang kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian dan menerangkan tentang berbagai macam teori yang mempunyai keterkaitan dengan studi kasus yang diteliti. Kemudian pada penelitian ini juga berisi studi penelitian terdahulu, definisi konsep, penjelasan variabel dan indikator serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini secara rinci membahas aspek-aspek spesifik penelitian, termasuk periode waktu penelitian, lokasi penelitian, populasi yang diteliti, sampel yang digunakan, jenis model penelitian yang diterapkan, dan juga teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis studi kasus secara terperinci. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan pengujian dua variabel yang digunakan serta terdapat hasil dari uji korelasi dan model regresi linear. Terdapat juga hasil dari uji hipotesis yang berupa data yang kemudian diinterpretasikan menjadi hasil yang akurat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan ringkas terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan saran terhadap masalah yang diteliti.